

NEGARA DEMOKRATIS DALAM PUSARAN KAPITALISME EKONOMI

Mohammad Rofiudin

Email : mohammadr072@gmail.com

STIE INDOCAKTI Jl. Besar Ijen No. 90-92 Malang, Jawa Timur

Abstrak, Kemenangan baik parlementer maupun presidensiil adalah kemenangan pertarungan politik para elit bukan kemenangan rakyat. Maka untuk dapat dikatakan suara rakyat adalah segalanya kini dipakai sistem parlementer bikameral sehingga rakyat tidak lagi ‘memilih kucing dalam karung’. dan pemilihan presiden secara langsung. Dengan begitu rakyat akan banyak berperan dalam sistem demokrasi. Setelah sistem demokrasi terbentuk perlu kiranya suatu negara memiliki lembaga birokrasi. Menurut Martin Albrow setidaknya ada tujuh pengertian birokrasi yang dapat dijadikan landasan, antara lain ; *rational organizational, organizational inefficiency, rule of officials, public mokradministration, administration by officials, type of organization with specific characteristic and quality as hierarchies and rules, and an essentials quality of modern society.* Sedangkan Hegel menganggap birokrasi sebagai institusi yang menjembatani negara sebagai manifestasi kepentingan umum dan *civil society* sebagai manifestasi kepentingan khusus dalam masyarakat.

Kata kunci : Negara demokratis, kapitalisme ekonomi

PENDAHULUAN

Frederich Engels pernah menulis dalam karya populernya tentang “Asal-usul Keluarga, Milik Perseorangan dan Negara” pada tahun 1894, yang kemudian dikutip oleh Vladimir Illich Lenin dalam menjejak negara, menurutnya; “Negara sekali-kali bukan merupakan kekuatan yang dipaksakan dari luar kepada masyarakat.

Negara juga bukanlah “realitas ide moral”, bayangan dan realitas akal, sebagaimana ditegaskan oleh Hegel. Negara adalah produk masyarakat pada tingkat perkembangan tertentu ; negara adalah pengakuan bahwa masyarakat ini terlibat dalam kontradiksi yang tak terpecahkan dengan dirinya sendiri, bahwa ia telah terpecah menjadi segi-segi yang berlawanan yang tak terdamaikan dan ia tak berdaya melepaskan diri dari keadaan demikian. Dan supaya dalam segi-segi yang berlawanan, kelas-kelas dengan kepentingan-kepentingan ekonominya bertentangan, tidak saling membinasakan satu sama lain dan tidak membinasakan masyarakat dalam perjuangan yang sia-sia, maka diperlukan kekuatan yang tampaknya berdiri diatas masyarakat, kekuatan yang seharusnya meredakan bentrokan itu, mempertahankannya didalam batas-batas ‘tata

tertib’. Dan kekuatan ini, yang lahir dari masyarakat, tetapi menempatkan diri diatas masyarakat dan yang semakin mengasingkan diri darinya, adalah negara.”

Dari sisi sosiologis nampak jelas bahwa negara sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Negara memang pada awalnya hanyalah sebuah ide ; ide tentang negara. Namun ide bukanlah apa-apa tanpa dilanjutkan dalam bentuk yang kongkrit. M. Nasroen menekankan bagaimana-kah realisasi dari ide negara tersebut akan berimplikasi pada bentuk atau corak negara dalam kenyataan, yang mana bentuk dan corak itu tergantung pada tempat lahir, waktu lahir dan tempat tumbuhnya negara. Dan dipandang dari sudut pandang sosiologis negara merupakan hasil dari suatu pergaulan hidup manusia yang ada sebelum negara itu ada yang mana negara merupakan suatu badan yang belum ada sebelum diadakan dan timbulnya merupakan suatu revolusi. Sejarahnya ada dan dimulai setelah negara itu ada. Sehingga ia meragukan pendapat Mac Iver tentang negara ; *is a product of social revolution* atau pendapat P.J. Bouman bahwa negara ; *is steeds een product van historische groei.* Kesimpulannya negara tidak diadakan berdasarkan perjanjian bersama (*social contract*) dari orang per orang yang hidup

terpisah dari ikatan dengan orang lain (*homo naturalis*), yang berarti orang itu belum lagi merupakan pergaulan hidup. Kemudian lanjutnya eksistensi negara karena sekumpulan orang tertentu yang ada dalam pergaulan hidup yang langsung mendahului negara itu dan berkehendak mau bernegara dan penyatuan kemauan bernegara murni adalah kepentingan diri sendiri masing-masing individu yang berkembang menjadi kepentingan bersama melalui tindakan sosial yang melahirkan syarat-syarat bernegara antara lain penduduk (rakyat), wilayah dan pemerintahan.

Bila Lenin melihat sejarah negara dari faktor kontradiksi kelas yang ada dalam masyarakat ; negara adalah produk dan manifestasi dari tidak terdamaikannya kontradiksi-kontradiksi kelas maka Nasroen melihatnya dari faktor psikologi destinasi sosial ; negara itu tidak mungkin lain daripada kemauan bersama manusia. Negara itu suatu usaha yang diadakan manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan dua pemahaman tersebut menurut hemat penulis negara dapat diartikan terintegrasinya berbagai kepentingan atau kemauan guna menghindari kontradiksi maka diperlukan alat pemersatu yang bernama negara, yang bila disamakan persepsi Plato dan Aristoteles sepakat adanya bentuk pemerintahan ; aristokrasi, oligarkhi dan demokrasi.

Bersamaan dengan itu bentuk demokrasi adalah bentuk paling ideal yang ada saat ini. Idealitas demokrasi terletak pada terwujudnya kemauan rakyat dalam bentuk negara. Implementasi suara terbanyak adalah hal utama yang dianut oleh demokrasi. Seiring dengan adagium *Vox Populi Vox Dei* prinsip-prinsip demokrasi terus didengungkan saat ini. Namun harus disadari dibalik demokrasi banyak yang harus diketahui dan dipahami.

Demokrasi parlementer dan demokrasi presidensiil merupakan dua diantara beberapa jenis demokrasi. Kita pernah mengenal dan merasakan keduanya. Demokrasi parlementer merupakan demokrasi yang berpijak pada suara terbanyak di dewan perwakilan rakyat alias parlemen sebaliknya presidensiil lebih berpijak pada lembaga kepresidenan dalam pengambilan kebijakannya. Pertarungan keduanya dalam sistem politik kita senantiasa terjadi hingga saat

ini. Pada awal pemerintahan bangsa ini telah terjadi dua kubu yang berseberangan antara Soekarno dan kawan-kawan di kepresidenan dengan Syahrir dan kawan-kawan di parlemen. Yang berujung pada dibentuknya kabinet baru pimpinan Syahrir yang berwajah parlementer. Hal ini oleh Soekarno dianggap *silent coup* yang berupaya menumpulkan sistem demokrasi presidensiil. Lambat laun setiap permasalahan negara yang tidak terselesaikan menjadi bumerang bagi parlemen dan senjata bagi presidensiil untuk menyerang musuh politiknya. Pada periode tahun 1950-1959 kekecewaan rakyat terakumulasi yang lalu memaksa Soekarno bersama A.H. Nasution mengeluarkan dekrit presiden 5 Juli 1959. Disinilah secara tidak langsung parlementer ditumpulkan oleh presidensiil.

Hal yang sama terjadi pada masa Soeharto dimana demokrasi presidensiil lebih banyak berperan daripada parlementer yang melahirkan kultus individu pada diri Soeharto. Pengkultusan itu berakibat munculnya kembali ide-ide parlementer yang semakin kuat dan berakhir pada jatuhnya Soeharto dari tampuk kekuasaan. Sampai disini demokrasi parlementer hadir dengan implikasi banyaknya partai politik yang secara bebas bersuara merebut hati rakyat. Pada saat presiden Abdurrahman Wahid berkuasa ide-ide presidensiil kembali mencuat dengan adanya kekecewaan rakyat atas kerja pemerintahan. Parlemen yang sejak lama menunggu momen seakan mendapat angin segar untuk menjatuhkan presiden. Lalu presiden menantang dengan mengeluarkan dekrit sama seperti yang dilakukan Soekarno pada tahun 1959. Namun Sidang Istimewa MPR 2001 lebih *legitimate* bila dilihat dalam UUD 1945 dan presidenpun lengser digantikan Megawati yang didukung oleh parlemen karena saat itu partainya merupakan pemenang pemilu 1999 yang berarti banyak pendukung di parlemen yang menginginkannya dan secara demokratis adalah sah.

Kesimpulan dari peristiwa diatas menunjukkan bahwa kemenangan baik parlementer maupun presidensiil adalah kemenangan pertarungan politik para elit bukan kemenangan rakyat. Maka untuk dapat dikatakan suara rakyat adalah segalanya kini dipakai sistem parlementer bikameral sehingga

rakyat tidak lagi ‘memilih kucing dalam karung’ dan pemilihan presiden secara langsung. Dengan begitu rakyat akan banyak berperan dalam sistem demokrasi.

Setelah sistem demokrasi terbentuk perlu kiranya suatu negara memiliki lembaga birokrasi. Menurut Martin Albrow setidaknya ada tujuh pengertian birokrasi yang dapat dijadikan landasan, antara lain ; *rational organizational, organizational inefficiency, rule of officials, public administration, administration by officials, type of organization with specific characteristic and quality as hierarchies and rules, and an essentials quality of modern society*. Sedangkan Hegel menganggap birokrasi sebagai institusi yang menjembatani negara sebagai manifestasi kepentingan umum dan *civil society* sebagai manifestasi kepentingan khusus dalam masyarakat.

Pendapat Hegel di atas dapat dikatakan mewakili pemahaman birokrasi sebagai *rational organizational*, namun pendapat ini dibantah oleh Karl Marx yang beranggapan bahwa birokrasi adalah alat dari kelas yang berkuasa yakni kaum borjuis dan kapitalis yang mengeksploitasi kaum proletar. Selain itu birokrasi merupakan parasit yang eksistensinya menempel pada kelas yang berkuasa dan dipergunakan untuk menghisap kaum proletar. Dengan demikian birokrasi dalam pandangan Marx bersifat kapitalistik. Yang artinya birokrasi akan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya demi kesejahteraan pribadi. Pendapat ini diperkuat oleh Max Weber, meski dia tidak memihak pada pendapat Marx karena hal itu berlangsung pada bidang ekonomi ; *“Bureaucracy, thus understood, is fully developed in political and ecclesiastical communities only in the modern state, and in the private economy, only in the most advanced institutions of capitalism.”*

Bila kita kaitkan kapitalisme birokrasi dengan kasus di Indonesia terdapat contoh kongkrit yang terjadi di era orde baru. Pertumbuhan ekonomi kita di masa orde baru

merupakan pertumbuhan kamufase yang dibuat oleh pemerintah saat itu. Hal itu terjadi ketika banyaknya para birokrat (pejabat) bekerja sama dengan para pengusaha kelas kakap mencoba merampok hasil bumi Indonesia dengan memanfaatkan jalur-jalur birokrasi negara. Seperti disinyalir oleh Priyo Budi Santoso “...pejabat-pejabat birokrasi memperoleh penghasilan dari keuntungan-keuntungan jabatannya dan bukan semata-mata dari gaji, sementara para pengusaha (*client*) memperoleh perlindungan dan konsesi dari para pejabat birokrasi ...praktek-praktek semacam ini menyingkapkan watak politik dan ketidakberesan aparat birokrasi Indonesia. Berkembanglah kemudian apa yang disebut dengan the Crony Capitalism, kapitalisme kekerabatan. Dalam sistem seperti ini, mereka yang berkembang secara ekonomi lebih ditentukan oleh lobby politiknya dan kedekatan atau kekerabatannya dengan pusat kekuasaan”.

Oleh karena itu mengapa jika keparahan korupsi kita sangat sulit diberantas salah satunya karena telah terintervensinya birokrasi kita dengan kepentingan-kepentingan orang-orang tertentu yang memegang kekuasaan. Pada saat orde baru berkuasa begitu banyak birokrat militer yang ‘bermain’ dalam mengurus perekonomian kita. Langkah yang efektif dilakukan salah satunya adalah memisahkan birokrasi dari urusan-urusan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Frederich Engels dikutip oleh V.I. Lenin dalam buku *Negara Dan Revolusi* ; Penerbit Fuspend ; cetakan ketiga 2001, hal. 4.
- M. Nasroen. *Asal Mula Negara*. Jakarta ; Aksara Baru, 1986, hal. 45.
- Mahrus Irsyam tentang *Presidensialisme vs Parleментарisme 1945-2001* di harian Jawa Pos edisi bulan Agustus 2001.
- Martin Albrow dalam Donald P. Warwick dalam Priyo Budi Santoso, *Birokrasi Pemerintah Orde Baru* , Jakarta ; Rajawali Press, 1995, hal.13
- Priyo Budi Santoso, , *Birokrasi Pemerintah Orde Baru* , Jakarta ; Rajawali Press, 1995.